

## **PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Ahmad Avenus<sup>1</sup>, Dinda Alfina<sup>2</sup>**

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>*

*Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Indonesia<sup>2</sup>*

E-mail: [ahmad\\_averus@yahoo.co.id](mailto:ahmad_averus@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

*Partisipasi politik masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik, salah satunya adalah pemilihan Kepala Desa Pengasih. Partisipasi politik ini diwarnai meningkatnya angka golongan putih (Golput) kemudian rendahnya sosialisasi pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, rendahnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan pengetahuan yang kurang, serta adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dan faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu kesadaran politik masyarakat dan keyakinan politik masyarakat. Adapun kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih cenderung dipengaruhi letak wilayah sebab Desa Pengasih memiliki dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah yang masih termasuk perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan memiliki kesadaran politik yang rendah dibanding masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan. Sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah Desa Pengasih terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan anggapan masyarakat terhadap sistem politik. Hal lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti kemauan politik, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Politik*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik bila kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut konstitusi. Hal itu

adalah bentuk demokrasi yang dianut di Indonesia, dimana rakyat memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga pemerintahan diadakan untuk mensejahterahkan rakyat. Demokrasi

sangat penting mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini rakyat berada pada posisi penting yang mempunyai kekuasaan menentukan penyelenggara pemerintah, ini berlaku dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Untuk demokrasi yang efektif maka dibutuhkan kesadaran masyarakat akan makna dan perannya sebagai warga negara dalam tatanan infrastruktur politik. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan masyarakat yang mampu mengekspresikan peranserta masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari pernyataan sikap, menyampaikan pendapat lewat sosial media, hingga pada demonstrasi yang tidak jarang berujung pada tindakan anarkis. Sedangkan kecenderungan yang terjadi pada tatanan suprastruktur politik juga terlihat, yakni upaya mewujudkan peran-peran pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat.

Kematangan Demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk kepentingan bersama dan cintanya pada negeri yang ditandai dalam bentuk pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka.

Pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi, maka idealnya partisipasi politik masyarakat merasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif. Akan tetapi partisipasi politik masih pada tingkatan pemilihan umum semata. Baik pada pemilihan secara nasional, di tingkat daerah, hingga tingkat desa. Pada situasi kondisi tersebut masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan proses pemilihan umum. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum, sebagai salah satu indikasi positif bahwa partisipasi politik telah terlaksana dengan baik oleh masyarakat. Partisipasi politik dapat dilaksanakan karena adanya kesadaran masyarakat bahwa pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan melaksanakan kedaulatannya secara maksimal maka akan tercipta hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan yang lebih erat disatu sisi, sedangkan di sisi lain akan terwujud makna demokrasi yang

menyatakan bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebagaimana pemilihan umum, juga terdapat pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkades merupakan salah satu bentuk praktek demokrasi pada lingkup kehidupan yang paling sederhana. Pilkades ini diikuti oleh calon-calon yang berkompeten dan sudah mengalami proses seleksi sebelumnya. Pemilihan ini bersifat transparan, artinya dari mulai tahapan persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara, masyarakat berhak mengetahuinya. Proses pemilihan kepala desa juga harus bersifat langsung, artinya masyarakat desa secara langsung memilih calon kepala desa tanpa ada perantara. Dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses kegiatan pemilihan kepala desa dan ikutserta dalam penentuan arah kebijakan pemerintah desa.

Pemilihan Kepala Desa telah menjadi proses politik yang hampir menjangkau setiap desa, tidak terkecuali desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan Kepala Desa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak,

penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan calon yang berhak dipilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Dikarenakan Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Pengasih, juga mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa yang telah berlaku. Adapun Desa Pengasih terletak di wilayah

Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pengasih ini mengikuti pilkades serentak dikarenakan adanya kekosongan kepala desa yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2014, tetapi karena diberlakukannya ketentuan untuk pelaksanaan pilkades serentak, sehingga baru tahun 2015 dilaksanakan proses untuk pengisian kades yang kosong.

Pilkades serentak di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada 20 September 2015 yang diikuti oleh 35 Desa dari 88 Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu desa dilaksanakannya pemilihan serentak adalah Desa Pengasih yang dijadikan lokus penelitian dikarenakan Desa Pengasih termasuk desa yang

maju dengan jumlah pemilih 6.926 pemilih dari 13 pedukuhan yang ada di Desa Pengasih. Dari jumlah pemilih tersebut kemudian dibagi menjadi 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilihan ini diikuti oleh 4 calon kepala desa.

Asil perolehan suara yang diperoleh pada pilkades tersebut, ternyata Desa Pengasih masih tercatat memiliki Golongan Putih (Golput) dari dua desa lainnya yang juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Pengasih. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemungutan suara pada pilkades yang dilaksanakan di tiga desa, mendapatkan perbandingan perolehan suara diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Hasil Peolehan Suara Di Tiga Desa Pada Tahun 2015**

No	Desa	Jumlah Pemilih Tetap	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput	Presentase Golput
1.	Desa Pengasih	6.926	5.231	160	1.535	22%
2.	Desa Sidomulyo	4.220	3.320	73	827	19%
3.	Desa Kedungsari	3.407	2.835	38	534	15%

Sumber: Pemerintahan Kecamatan Pengasih, Tahun 2015

Pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Desa Pengasih, Desa Sidomulyo dan Desa Kedungsari memiliki hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Terutama pada tingkat Golongan Putih (Golput). Ternyata dari tiga desa tersebut, Desa Pengasih memiliki presentase golput yang tinggi yaitu 1.535 suara atau 22%. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pemilik suara tentang

tata cara pemilihan. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, tidak semua warga mendapatkan sosialisasi dari kampanye para calon kepala desa. Dalam pemilihan langsung termasuk dalam pemilihan kepala desa, tahapan sosialisasi merupakan hal yang penting dalam memberikan pemahaman tentang pemilihan kepala desa. Jadi hal tersebut bukan hanya bersifat simbolik saja, atau bahkan penyampaian

dilakukan hanya pada orang tertentu saja.

Pilkades serentak yang diadakan di Kulon Progo Yogyakarta juga diwarnai politik uang (*money politic*) yang dilakukan di beberapa desa. Meski demikian, hal ini tidak terungkap secara terang-terangan di semua desa yang melaksanakan pilkades. Perilaku pemilih maupun para calon kepala desa sendiri masih dijumpai permasalahan-permasalahan yang membuat rusaknya demokrasi. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Kasus politik uang (*money politic*) akan mencederai proses demokrasi dan juga akan merugikan hak masyarakat sebagai warga negara, dimana mereka adalah penentu penyelenggara pemerintahan desa di masa mendatang, kondisi demikian sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat.

Sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Para calon akan melakukan berbagai cara agar dapat menarik perhatian rakyat sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut. Oleh karena itu untuk mendukungnya diperlukan kampanye, pengerahan massa, dan sosialisasi. Disamping itu dari informasi yang berhasil diperoleh dilapangan bahwa masyarakat yang memilih golput disebabkan *pertama*, berkaitan waktu. Biasanya waktu penyelenggara pemilihan berbenturan dengan aktivitas kerja atau kesibukan para pemilih. *Kedua*, karena masyarakat desa kurang mengenal

sosok dari calon kepala desa. Hal ini karena calon kepala desa bukanlah sosok yang familiar di masyarakat, sehingga pengenalan calon bukan hanya melalui spanduk, melainkan melalui tim sukses yang melakukan pendekatan langsung pada masyarakat desa agar lebih mengenal siapa calon kepala desa. *Ketiga*, karena kecewa tidak ada perubahan yang berarti. Masyarakat merasa kecewa karena para calon saat berkampanye hanya menyampaikan visi misi saja, sebaiknya mereka juga memberikan jaminan jika program yang disampaikan saat kampanye tidak terlaksana (pertanggung jawaban moral pemimpin terhadap rakyat).

Golput tidak hanya dilihat sebagai wujud dari rendahnya partisipasi politik, akan tetapi seyogianya golput dipahami sebagai sikap politik perlawanan terhadap praktek politik yang amoral dari mereka yang kecewa terhadap penyelenggaraan pemilihan. Jadi, daripada memilih calon yang tidak berintegritas dan tidak berkompeten lebih baik tidak memilih siapa pun. Pengertian Golput di atas terbatas pada orang-orang yang sadar menentukan pilihan dengan cara tidak memilih, dengan berbagai alasan yang diluar kuasanya misalnya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang terkendala administratif, tekanan dari pihak lain untuk tidak memilih, kejenuhan yang dirasakan masyarakat, serta kurang kesadaran politiknya serta kelalaian.

## KAJIAN PUSTAKA

Surbakti dalam Sastroatmodjo menyebutkan dua variabel aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan keyakinan politik terhadap pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Kesadaran politik seseorang juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya. Sedangkan keyakinan politik terhadap pemerintah menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian merupakan rangkaian kepercayaan, baik yang menyangkut pemerintah dapat dipercaya atau tidak, maupun pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Artinya, jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pemilihan Kepala Desa Pengasih. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik. Penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang partisipasi politik masyarakat pada pilkades, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam pilkades. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian. Langkah-langkah teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu data tertulis yang telah ada, lalu data hasil observasi berupa hasil pengamatan sekaligus turut aktif dalam aktivitas informan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada para informan yang ditunjuk maupun informan yang direkomendasikan. Sedangkan Tahapan penelitian lapangan dimulai dari orientasi, yaitu kegiatan awal yang dilakukan untuk pengenalan dan mendekati diri antara peneliti dengan informan. Tahap eksplorasi, yaitu tahapan yang berfokus pada pengumpulan data secara terarah dan spesifik. Tahap *member check*, yaitu hasil observasi dan wawancara dianalisis dalam bentuk laporan sementara yang selanjutnya menjadi bahan diskusi bersama informan, hal itu dilakukan untuk menghindari kekeliruan. Dalam penelitian ini tindakan *cross-check* ataupun *check and riceck* informasi yang diperoleh

sangat ditekankan demi mendapatkan informasi yang akurat.

Dilanjutkan analisis dengan tahapan *pertama*, koding data yaitu informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan diberi kode-kode tertentu sesuai topik. Selain itu dilakukan pula catatan lapangan (*field-notes*). *Kedua*, reduksi data merupakan proses pemilihan data, fokus perhatian, penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang dilakukan saat menyusun catatan lapangan (*field-notes*) ketika berada di lapangan. *Ketiga*, Tampilan data yaitu data dari hasil penelitian lapangan disusun dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dilakukan sekaligus. Verifikasi hasil pengolahan data telah didiskusikan dengan informan guna menghindari kesalahan interpretasi. Diskusi dilakukan jika masih terdapat informasi yang dianggap belum jelas. *Keempat*, Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan penelitian dan jawaban atas masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Untuk menilai partisipasi politik masyarakat di Desa Pengasih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), maka peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Surbakti dalam Sastroatmodjo yang menyebutkan dua variabel aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik

seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan keyakinan politik terhadap pemerintah. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kedua aspek yang menjadi dasar penilaian partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih, kedua hal tersebut sebagai berikut:

#### Kesadaran Politik

Di Desa Pengasih, kesadaran politik seseorang dipengaruhi oleh sosialisasi dan kekerabatan. Ini sebagaimana terjadi penduduk desa pada umumnya yang memiliki kekerabatan yang dekat antara satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut sosialisasi turut andil dalam meningkatkan partisipasi politik, sebab sosialisasi sebagai instrumen informasi dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya partisipasi politik bagi pembangunan desa di masa mendatang. Berdasarkan observasi, kesadaran politik masyarakat di Desa Pengasih cenderung berbeda antara masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah pedalaman perdesaan dengan masyarakat Desa Pengasih yang sudah masuk dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, wilayah Desa Pengasih terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah pedalaman perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Oleh sebab itu, perilaku dan kesadaran politik masyarakat dapat diwarnai oleh faktor geografis antara wilayah perdesaan dengan wilayah yang sudah memasuki perkotaan.

Masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan masih menjunjung nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, serta cenderung mengikuti pemimpin atau tokoh masyarakat yang dituakan dan berpengaruh di desa tersebut. Perilaku tersebut sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih yang berada di wilayah perdesaan. Hingga pilihan masyarakat pun juga ditentukan oleh pilihan mereka yang dituakan dan dihormati. Bagi mereka yang pilihannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya maka akan berdampak pada hukuman sosial, yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan memiliki kesadaran politik yang tidak tergantung pada mereka yang ditokohkan ataupun dituakan. Dalam hal ini pilihan ditentukan atas dasar kehendak dan pandangan pribadi. Jadi tidak ikut-ikutan orang lain dalam menentukan pilihannya, sebab masyarakat memiliki pemikiran lebih terbuka dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa Pengasih.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa Desa Pengasih wilayahnya terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Pada wilayah perdesaan masyarakatnya masih kurang aktif karena kebanyakan mereka mempunyai kegiatan lain dan hanya

menuruti kepada mereka yang dituakan, sedangkan wilayah perkotaan perilaku dan kesadaran masyarakatnya lebih aktif untuk mengikuti kegiatan politik karena masyarakatnya sudah berkembang pada kondisi modern. Pihak panitia juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi hanya terbatas pada wilayah tertentu dikarenakan terkendala anggaran. Disisi lain desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pilkades karena pilkades serentak langsung diurus oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah sendiri anggarannya banyak yang dipangkas sehingga sosialisasi sangat terbatas dan hanya dilakukan sebagai formalitas saja. Artinya hanya wilayah tertentu yang diberikan sosialisasi dan dipilih secara acak saja. Dari hasil wawancara, menunjukkan partisipasi politik masyarakat Desa Pengasih sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Sedangkan kondisi geografis turut mempengaruhi cara pandang masyarakat Desa Pengasih yang berbeda antara satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran politik yang berbeda pula. Dari data wawancara tersebut juga diketahui bahwa dengan pelaksanaan pilkades serentak maka sosialisasi pilkades diambil langsung oleh pemerintah daerah, akibatnya sosialisasi menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran penyediaan alat peraga maupun alat sosialisasi lainnya, serta dengan keterbatasan anggaran tersebut

sehingga cakupan area sosialisasi menjadi terbatas, akibatnya informasi kepada masyarakat tidak meluas. Dampak dari keterbatasan tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah yang disebabkan minimnya informasi dan edukasi publik.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa terutama wilayah perdesaan, tidak menutup kemungkinan masyarakat perdesaan terpengaruh politik uang (*money politic*). Sedangkan untuk masyarakat perkotaan, mereka kebanyakan ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun dengan keterbukaan, terjadinya *money politic* untuk wilayah perkotaan relatif kecil. Dari wawancara tersebut, menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pengasih memiliki tingkat kesadaran politik yang masih rendah khususnya yang berada di wilayah perdesaan, sehingga upaya mendorong kesadaran politik masyarakat maka harus ada pemicunya. Melihat kondisi lapangan bahwa salah satu upaya mendorong kesadaran politik masyarakat dengan cara politik uang (*money politic*) yang diberikan oleh para calon kepala desa. Pada posisi ini, keberadaan *money politics* dimaksudkan agar para pemilih memiliki keinginan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Disamping itu, adanya keterbukaan di masyarakat merupakan salah satu upaya meminimalisir *money politics*.

Hal ini penting karena *money politics* ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan korupsi dilakukan pada “area gelap”. Oleh karena itu keterbukaan merupakan salah satu sistem menangkal *money politics*.

Dapat dikatakan bahwa kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial, hukum, dan sebagainya. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Kesadaran politik seseorang juga menyangkut seberapa banyak informasi dan pengetahuan yang dimilikinya menyangkut lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya.

### **Keyakinan Politik Terhadap Pemerintah**

Di Desa Pengasih, keyakinan politik terhadap pemerintah dipengaruhi oleh dua hal yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan persepsi masyarakat terhadap sistem politik. Lebih lanjut dari hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemimpin**

Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin salah satunya disebabkan oleh perilaku pemimpin, yang memiliki mental kepemimpinan, bertanggungjawab, berkharisma, tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),

siap melayani, dan mengabdikan kepada masyarakat, serta menjadi panutan masyarakat yang dipimpinya. Demikian halnya dengan masyarakat di Desa Pengasih yang mengharapkan Kepala Desa Pengasih merupakan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan sebelumnya dan yang dapat diandalkan bagi masyarakatnya di Desa Pengasih.

Setiap pemimpin tentunya memerlukan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat maupun dari mereka yang dipimpinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis, dan kekeluargaan. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap pemimpinnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Desa Pengasih terhadap seorang kepala desanya masih tinggi. Contohnya saja pada saat terjadi lelayu (ada anggota keluarga yang meninggal), warga masyarakat mengharapkan pemimpin yaitu kepala desa untuk menghadiri acara tersebut dan mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan pamitan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan karena masyarakat percaya bahwa kepala desa adalah orang yang dituakan di Desa Pengasih. Dari wawancara terdeskripsikan bahwa masyarakat Desa Pengasih percaya dan sangat menghargai sosok pemimpin kepala desa. Ini ditandai dari adanya keinginan Masyarakat Desa Pengasih

agar kepala desa hadir disetiap acara yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara terhadap salah satu perangkat Desa Pengasih diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Pengasih bisa dikatakan terbuka dan menghargai kepala desanya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin cukup antusias karena kami beranggapan perlunya seorang pemimpin untuk membangun wilayah desanya agar lebih makmur, sejahtera dan pastinya lebih maju lagi. Kami merasa perlunya sosok pemimpin untuk masyarakat, melayani dan juga mengabdikan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa kecintaan sekaligus harapan masyarakat Desa Pengasih terhadap kepala desa karena sosok pemimpin yang didambakan adalah pemimpin yang dapat berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya.

Kepercayaan, kecintaan, dan dukungan merupakan modal utama yang diperoleh pemimpin yang melalui proses pemilihan langsung termasuk bagi kepala desa yang dipilih secara langsung dalam Pilkades. Hal lain yang juga diungkapkan bahwa masyarakat Desa Pengasih menginginkan sosok kepala desa sebagai pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner merupakan pemimpin yang berpikiran jauh kedepan melampaui zamannya karena sosok pemimpin demikian yang dapat membangun desanya serta mampu memerhatikan rakyatnya, melayani rakyatnya, dan juga mengabdikan kepada

masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan di Desa Pengasih.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pemangku Dukuh Jamus. Dari wawancara diperoleh informasi bahwa memang benar kebanyakan masyarakat percaya terhadap kepala desa sebagai pemimpin karena pemimpin merupakan orang yang dituakan. Sedangkan bagi masyarakat yang lain, terkadang mereka masih ragu karena kebanyakan dari mereka yang pendidikannya tinggi sehingga mempunyai pemikiran bahwa ada kemungkinan perubahan tidak akan sama seperti yang dulu. Sehingga masyarakat hanya berpikiran yang penting ikut pemilihan karena terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa struktur sosial yang berlaku di masyarakat turut mendukung adanya kepercayaan (legitimasi) masyarakat Desa Pengasih terhadap kepala desa, dengan pertimbangan sikap senioritas yang berlaku dalam tatanan sosial masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sikap turun temurun masyarakat Indonesia yang sangat menghormati pada seseorang yang menyandang status ketokohan atau mereka yang dihormati dalam masyarakat. Sedangkan disisi lain, menunjukkan bahwa usia masih menjadi penentu dalam kepemimpinan di desa. Dalam hal ini masih terdapat keyakinan bahwa usia menentukan kematangan berpikir, dengan keyakinan bahwa keputusan atau kebijakan pemimpin akan berakibat luas, sehingga dibutuhkan

mereka yang matang dalam berpikir dan merenung sebelum menentukan keputusan atau kebijakan. Lebih lanjut keyakinan atau kepercayaan terhadap pemimpin dipengaruhi bagaimana ikatan emosional atau perasaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ikatan emosional ini terbangun karena adanya peran aktif dari Kepala Desa sebagai pemimpin, disamping itu Kepala Desa dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Dari peran positif yang dilakukan kepala desa inilah yang kemudian memunculkan sikap respek yang baik dari masyarakat. Disamping itu mayoritas masyarakat Desa Pengasih juga beranggapan bahwa seorang pemimpin itu sebagai tokoh yang dituakan, yang dibanggakan dan dipercaya untuk memimpin masyarakatnya.

Selain itu dari hasil observasi, peneliti menilai bahwa masyarakat Desa Pengasih mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kepala desa sebagai pemimpinnya. Hal ini dilihat dari mereka yang menginginkan keikutsertaan seorang kepala desa dalam setiap acara yang dibuat masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang ragu terhadap kepemimpinan kepala desa, beranggapan bahwa ada atau tidak ada kepala desa akan terjadi perubahan, yang mana kondisi saat ini tidak akan sama dengan kondisi di masa depan, sehingga bagi masyarakat yang berpikiran demikian, hanya beranggapan yang penting mereka ikut pemilihan kepala desa karena sudah

terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

### **b. Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Politik**

Keyakinan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kemudian menjadi budaya bagi masyarakat itu sendiri. Keyakinan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemimpinnya. Persepsi dalam politik sangatlah penting karena akan menentukan kehidupan politik kedepannya nanti. Dari wawancara yang dilakukan kepada Camat Pengasih diperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Pengasih memiliki sikap terbuka dengan adanya pilkades. Pada saat masa kampanye bagi para calon kades, masyarakat sangat antusias dalam berbagai acara kampanye. Namun apabila mereka ditanya bagaimana dengan pilkades, kebanyakan mereka tidak tahu, apalagi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, karena cenderung mereka belum mengenyam pendidikan yang memadai, yang mereka tahu hanyalah bila ikut dalam keramaian saat kampanye maka itulah partisipasi politik. Terkadang mereka kurang menyadari kalau disitu terdapat praktek politik uang karena keterbatasan pengetahuan mereka. *Money politics* juga tidak dilakukan secara terang-terangan namun diberikan dalam bentuk barang bantuan. Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan masyarakat Desa Pengasih menerima penyelenggaraan Pilkades. Masyarakat cenderung ikut berpartisipasi dalam Pilkades meskipun

dengan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. Disisi lain politik uang juga masih dijumpai di masyarakat walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terselubung dalam berbagai bentuk kegiatan dan cara yang sangat halus yang dikemas dalam bentuk barang bantuan, dengan maksud untuk menanam budi. Disisi lain motivasi dalam politik uang adalah untuk memicu partisipasi politik masyarakat Desa Pengasih karena adanya kekhawatiran bila tanpa politik uang partisipasi politik akan rendah.

Hal ini juga didukung dengan penjelasan Kepala Desa Pengasih yang menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa sistem politik itu hanya pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, terkadang dari jauh-jauh hari pelaksanaan pilkades sudah dilakukan sistem politik ntah dengan cara apa yang dilakukan, cuma mereka kurang menyadari sehingga mereka cenderung menerima dan ikut-ikutan karena mereka tidak tahu apa-apa. Dari informasi tersebut tergambar bahwa sistem politik pilkades secara umum tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam persepsi masyarakat Desa Pengasih tentang sistem politik hanya dilakukan saat pelaksanaan pemilihan saja. Mereka kurang memahami dan menyadari tentang sistem politik yang berkaitan dengan pemilihan langsung karena tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya masih rendah dan ditambah lagi dengan minimnya tingkat edukasi politik terhadap masyarakat.

Kemudian wawancara dilakukan kepada pemangku Dukuh Pengasih sekaligus calon kades yang tidak terpilih, informan memberikan penjelasannya bahwa warga Desa Pengasih belum sepenuhnya mengetahui sistem politik (pemilihan kepala desa), selain karena keterbatasan pengetahuan, hal ini ditambah dengan wilayah Desa Pengasih yang terbagi menjadi 2 yaitu wilayah perdesaan dan wilayah yang sudah memasuki perkotaan. Sistem politik ini (pemilihan kepala desa) sangat berpengaruh pada penentuan pemilihan kepala desa, sehingga mereka kurang menyadari. Mereka cenderung menerima tanpa mengetahui sistem tersebut salah atau benar, mengikuti keadaan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menilai bahwa perspektif masyarakat Desa Pengasih terhadap sistem politik pemilihan kepala desa yang berlaku belum sepenuhnya diketahui dan dipahami, mereka cenderung hanya mengikuti apa yang sudah berlaku sebelumnya. Kebanyakan dari mereka hanya menerima tanpa memahami maksud dari rangkaian kegiatan pemilihan. Hal ini disebabkan pengetahuan politik masyarakat Desa Pengasih yang masih rendah. Sudah semestinya dalam membangun sistem pemilihan langsung seperti pemilihan kepala desa harus didahului dengan kepastian pendidikan yang memadai bagi masyarakat, sebab tingkat pendidikan masyarakat yang memadai

maka akan menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Selain itu partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari tinggi atau rendahnya keyakinan masyarakat terhadap sistem maupun calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilihan kepala desa. Pada posisi ini aspek keyakinan dalam partisipasi politik masyarakat terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu aspek kepercayaan terhadap pemimpin dan aspek anggapan terhadap sistem politik. Berikut data hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengasih, yang menggambarkan pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa

**Tabel 2**  
**Hasil Pemilihan Kepala Desa**  
**Di Desa Pengasih Tahun 2015**

Suara sah	5.231	75 %
Suara tidak sah	160	2 %
Golput	1.535	22 %
Total	6.926	

Sumber : Pemerintahan Desa Pengasih, Tahun 2015

Berdasarkan data lapangan menunjukkan pilihan untuk tidak memilih ternyata masih tinggi. Pilihan politik yang tidak memilih menunjukkan bahwa kepercayaan dan persepsi terhadap pemimpin dan sistem politik yang berlaku masih rendah. Kepercayaan atau keyakinan terhadap calon kepala desa berkaitan erat dengan sosok yang akan dipilih. Dimana aspek kepercayaan terhadap pemimpin ini akan timbul dari dalam diri setiap individu yang disebabkan oleh sikap

dan perilaku pemimpin maupun calon pemimpin, pada aspek tersebut penilaian masyarakat sangatlah kuat dan menjadi penentu bagi adanya kepercayaan. Sedangkan aspek persepsi masyarakat terhadap sistem politik berdasarkan atas keyakinan terhadap kehidupan politik yang dilihatnya dan dialaminya. Dalam hal ini anggapan atau persepsi terhadap sistem politik pemilihan kepala desa menunjukkan tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan intervensi pada aspek anggapan atau persepsi masyarakat terhadap sistem politik dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa korelasi antara persepsi dan keyakinan sangatlah kuat karena keyakinan yang menentukan persepsi.

#### **Faktor-faktor Yang Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pengasih**

Pemilihan kepala desa belum begitu efektif karena masih tingginya angka mereka yang tidak memilih atau golongan putih (golput). Hal ini disebabkan karena berbagai perspektif masyarakat Desa Pengasih terhadap

penyelenggaraan pilkades. Selain itu juga ditunjang dengan semaraknya politik uang dalam berbagai kemasam, walaupun tidak secara terbuka dilakukan, ditambah lagi dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pengasih. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa faktor penyebab tingkat partisipasi politik masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

#### **Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pengasih**

Masyarakat Desa Pengasih mayoritas mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Adapun yang hanya tamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dapat dikatakan masih banyak. Sedangkan yang berhasil mencapai diploma dan strata masih kurang dibandingkan jumlah yang hanya tamat SD. Jumlah masyarakat yang tidak sekolah dan tidak menamatkan tingkatan pendidikan juga banyak. Hal ini dapat dilihat pada data tingkat pendidikan penduduk Desa Pengasih pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

#### **Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pengasih Tahun 2015**

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	961	900	1.861
2	Tamat SMP/Sederajat	516	601	1.117
3	Tamat SMA/Sederajat	1.450	1.061	2.511
4	Tamat D-1	10	12	22
5	Tamat D-2	24	20	44
6	Tamat D-3	114	100	214
7	Tamat S-1	447	350	797

8	Tamat S-2	25	11	36
9	Tamat S-3	-	-	-
10	Tidak pernah sekolah	150	200	350
11	Usia 18 – 56 tidak tamat SD	7	16	23
12	Usia 18 – 56 tidak Tamat SMP	250	400	650
13	Usia 18-56 tidak tamat SMA	318	403	721

Sumber : Pemerintahan Desa Pengasih, Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat beragam tingkat pendidikan warga Desa Pengasih, kondisi demikian turut menjadi salah satu pengaruh bagi partisipasi politik masyarakat. Seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pengasih bahwa masyarakat yang pendidikannya menengah ke bawah adalah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sampai jenjang atas, seperti masyarakat yang hanya lulusan SD, SMP, dan tidak melanjutkannya. Mereka kebanyakan masyarakat yang ada di wilayah perdesaan Desa Pengasih, sehingga mereka kurang terjangkau informasi perkembangan dunia pendidikan. Akibatnya disaat tahapan pilkades berlangsung, banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan siapa yang akan dipilih dan politik uang biasanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal itu disebabkan tidak ada pendirian dan pemikiran yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Akhirnya masyarakat kebingungan untuk menentukan dan memutuskan pilihannya karena pengetahuan mereka yang rendah. Hasil wawancara semakin menegaskan tingkat pendidikan sebagai salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkades di Desa Pengasih. Tingkat

pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat. Apabila masyarakat kurang memiliki pengetahuan politik, tentunya masyarakat desa merasa Pilkades tidak begitu penting bagi kehidupan mereka, sehingga partisipasi politik tidak kuat dan hanya akan ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dan memahami tentang partisipasi politik. Oleh karena itu tingkat pendidikan menjadi sangat penting dalam politik.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada pemangku Dukuh Terbah. Dari wawancara, diperoleh informasi bahwa pendidikan akan mempengaruhi status sosial masyarakat. Semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi kesadaran politik. Mereka yang terdidik akan turutserta dan aktif dalam kegiatan politik karena mereka sadar akan pentingnya pilkades tersebut. Sedangkan mereka yang pendidikannya rendah cenderung memilih pasif mengikuti tahapan pilkades, termasuk pasif terhadap para calon, mereka hanya ikut-ikutan saja dengan warga lainnya. Wawancara tersebut semakin memperjelas bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi status sosial seseorang, yakni pendidikan tinggi maka status sosialnya juga tinggi demikian pula sebaliknya. Dengan

memiliki pendidikan dan status sosial yang tinggi maka akan tinggi pula tingkat berpartisipasi politik dalam Pilkades. Sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah maka akan memiliki status sosialnya yang juga rendah, akibatnya mereka cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah pada pilkades, disamping itu mereka juga tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh Ketua RT.58 Terbah yang menyatakan pendidikan membuat seseorang paham akan keluasan pengetahuan, tentunya ini akan mempengaruhi masyarakat aktif atau tidaknya dalam kegiatan politik. Dalam pilkades ada masyarakat yang ikutserta, dan ada juga yang tidak ikutserta, ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta juga ada yang melakukan kesalahan saat melakukan pemilihan. Padahal jika dilihat berdasarkan pendidikannya, sebagian besar mereka pernah menempuh Pendidikan formal pendidikan. Dari informan tersebut menunjukkan tingkat pendidikan seseorang dapat memberikan peranan penting bagi aktivitas seseorang dalam partisipasi politik pilkades, serta bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi

akan memiliki tingkat kesadaran berpolitik yang juga tinggi, tetapi sebaliknya apabila pendidikan mereka rendah maka kesadaran dalam berpolitik juga rendah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik. Disamping itu dari data lapangan yang berhasil dihimpun mengisyaratkan bahwa pendidikan masyarakat merupakan komponen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada peningkatan kesadaran partisipasi politik masyarakat, sebab pendidikan berpengaruh pada pelaksanaan pemilihan kepala desa karena dari masyarakat terdidik akan menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat.

### **Tingkat Ekonomi Masyarakat Desa Pengasih**

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Pengasih secara dominan masih dibawah rata-rata tingkat sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Pengasih yang bekerja sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut:

**Tabel 4**  
**Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Pengasih Tahun 2015**

No	Pedeukuhan	Jenis pekerjaan								
		PNS/ BUM D	TNI/ POL RI	Pensiun	Petani	Swasta	Buruh	Wira usaha	Jasa/ lainnya	Jumlah
1.	Pengasih	153	23	27	23	86	25	18	151	506
2.	Kedunggalih	65	2	1	19	14	9	29	24	163
3.	Dayakan	56	12	3	101	273	8	26	248	727
4.	Serut	82	20	4	26	60	11	40	63	306

5.	Terbah	60	12	0	120	194	30	172	194	782
6.	Tunjungan	28	4	0	128	69	33	346	28	636
7.	Clawer	4	0	0	84	7	37	36	4	172
8.	Jamus	7	1	0	103	10	218	80	10	429
9.	Timpang	0	0	3	31	6	25	16	13	94
10.	Ngento	2	2	0	112	28	33	22	13	212
11.	Kepek	18	5	1	154	34	95	30	71	408
12.	Derwolo	17	5	0	89	80	158	20	80	449
13.	Klampis	10	1	3	48	68	89	102	27	348
	<b>Jumlah</b>	502	87	42	1.038	929	771	937	926	5.232

Sumber : Profil Desa Pengasih, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani masih mendominasi daripada masyarakat yang bekerja pada sektor lainnya dengan jumlah 1.038 orang. Penghasilan petani belum memadai sehingga masyarakat yang bekerja sebagai petani kurang aktif memikirkan urusan politik apalagi mengikuti kegiatan politik. Hal ini dikarenakan mereka masih lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka untuk kelangsungan hidup.

Berdasarkan data lapangan maka peneliti mengidentifikasi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka semakin tinggi pula partisipasi politik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat maka semakin rendah pula partisipasi politik. Hal ini diperkuat dengan informasi yang berhasil diperoleh dari sekretaris penyelenggara pilkades yang menyatakan semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka semakin tinggi keinginan seseorang dalam berpolitik, artinya ketika masyarakat sudah merasa cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka masyarakat akan berpartisipasi dalam politik, termasuk pada pemilihan

kepala desa. Sebaliknya bagi masyarakat yang belum memiliki kecukupan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari, akan lebih mengedepankan bekerja ketimbang harus berpartisipasi politik seperti datang ke TPS. Dalam benak masyarakat seperti ini, partisipasi politik tidak akan menambah kualitas hidup mereka, sedangkan kehidupan mereka membutuhkan hasil jeripayah untuk bertahan hidup. Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi politik. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat mempertimbangkan waktu bekerja mereka, ketimbang harus mengikuti pemilihan kepala desa. Akan tetapi, bagi masyarakat yang berkeekonomi mapan, mereka akan meluangkan waktu untuk mengikuti pemilihan kepala desa tersebut. Data di atas mempertegas tentang tingkat partisipasi politik masyarakat akan sangat ditentukan oleh tingkat ekonomi.

Dari hasil wawancara terhadap perangkat Desa Pengasih, diperoleh informasi bahwa pekerjaan masyarakat Desa Pengasih yang kebanyakan

seorang petani, pedagang, pegawai serabutan, dan lain sebagainya, sehingga tingkat ekonomi mereka dapat dikatakan belum mapan. Kondisi demikian berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat karena pekerjaan masyarakat yang kebanyakan berada pada tingkat menengah ke bawah. Terbukti pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, masih ada masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya, ini salah satu faktor yang mempengaruhi, masyarakat lebih memilih bekerja dibandingkan datang ke TPS dan memilih. Dari data wawancara tersebut menegaskan pentingnya derajat ekonomi masyarakat dalam menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengasih. Hal ini semakin membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat Desa Pengasih yang tidak memberikan hak suaranya dikarenakan mereka lebih memilih untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mencoblos di TPS.

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh panitia penyelenggara pilkades yang mengatakan wilayah Desa Pengasih terdiri atas 2 wilayah yaitu perdesaan dan wilayah sudah memasuki perkotaan. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Selain itu juga terdapat masyarakat Desa Pengasih yang bekerja di luar Desa Pengasih, kondisi ini juga menjadi salah satu alasan

masyarakat pasif mengikuti kegiatan politik pemilihan kepala desa, mereka tidak terlibat partisipasi politik karena waktu dan jarak dari rumah ke tempat mereka bekerja. Berdasarkan kedua wawancara diatas, semakin menegaskan bahwa masyarakat Desa Pengasih cenderung berpendapatan ekonomi menengah kebawah sehingga disadari ataupun tidak akan berpengaruh terhadap partisipasi politik. Lokasi kerja yang jauh dari Desa Pengasih juga turut menjadi penyebab minimnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Kondisi demikian mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk tetap bekerja demi kelangsungan hidup daripada harus mengikuti pemilihan kepala desa, artinya mereka lebih cenderung pasif mengikuti kegiatan politik.

Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang masyarakat Desa Pengasih, diperoleh informasi bahwa penurunan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Kondisi itu mengakibatkan mereka tidak memiliki waktu meninggalkan pekerjaan, dan juga hal tersebut dikarenakan tempat kerja berada di luar wilayah Desa Pengasih. Tentunya kondisi tersebut berpengaruh pada pemilihan kepala desa. Dari data lapangan, peneliti menilai bahwa tingkat ekonomi masyarakat Desa Pengasih menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan

Kepala Desa (Pilkades). Hal itu dikarenakan tingkat ekonomi berpengaruh pada aktivitas partisipasi politik. Pendapat peneliti juga diperkuat dengan pendapat Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrew yang menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya masyarakat dalam keikutsertaan dalam politik. Tingkat ekonomi disini dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat.

### **Kemauan Politik Masyarakat Desa Pengasih**

Tingkat Pendidikan dan kemapanan ekonomi masyarakat yang baik, akan mendorong kemauan politik masyarakat. Adapun kemauan politik dalam hal ini merupakan kepedulian masyarakat terhadap situasi kondisi politik. Kepedulian politik ini sangat penting sebab sebagai bentuk kesadaran akan kepentingan bersama, baik dalam pemenuhan hak maupun dalam pelaksanaan kewajiban. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Pengasih yang peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan politik ataupun mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik. Ternyata mereka yang memiliki kepedulian atau kemauan politik adalah mereka yang telah terpenuhi dengan baik kebutuhan pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sekretaris panitia penyelenggara pilkades,

diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemilihan pilkades banyak melalui berbagai tahapan, seperti sosialisasi, hingga kampanye yang dilakukan para calon kepala desa. Sebagaimana pada pemilihan langsung, tahapan kampanye merupakan upaya menarik simpati dan perhatian masyarakat terhadap para calon. Salah satu upaya menarik simpati masyarakat terhadap calon kepala desa adalah memberikan bantuan kepada masyarakat, walaupun yang disampaikan oleh calon tersebut merupakan hal yang kecil, namun dilakukan secara kontinue sehingga lama kelamaan akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Cara ini dilakukan pada setiap pemilihan kepala desa, sebagai upaya menarik perhatian masyarakat tersebut. Informasi tersebut menunjukkan, antusias masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dikarenakan adanya peran aktif dari para calon kepala desa saat sesi kampanye berlangsung. Disamping itu kampanye dalam bentuk bantuan masih menjadi senjata pamungkas dalam pemilihan kepala desa. Aktivitas calon kepala desa yang banyak memberikan bantuan kepada masyarakat dimasa kampanye dimaksudkan menarik simpati dari masyarakat agar memilihnya dan mendorong partisipasi politik masyarakat, dengan banyaknya partisipasi masyarakat maka pemilihan kepala desa akan berjalan dengan semarak.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua Panitia Pilkades

Desa Pengasih. Saat wawancara, informan menyatakan kegiatan politik disini (Desa Pengasih) cukup terbuka, namun masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang wajar, walaupun dilakukan dalam berbagai kemasan. Kondisi demikian, dikarenakan pemilihan kepala desa sebelumnya juga terdapat kegiatan yang dianggap kurang wajar. Akan tetapi tindakan tersebut tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat setempat, ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap politik. Kondisi yang demikian memerlukan kemauan politik yang kuat dari para calon membentuk politik yang baik dan sehat dalam menciptakan partisipasi politik masyarakat. Data wawancara menunjukkan berbagai kegiatan dilakukan oleh para calon kepala desa, mulai dari kegiatan yang tidak melanggar aturan selama masa pemilihan, hingga kegiatan yang dikategorikan melanggar norma yang berlaku. Namun kegiatan yang melanggar norma selama kampanye justru dimaklumi karena aktivitas tersebut dianggap sebagai kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan dalam menarik simpati masyarakat agar mengenal dan memilih para calon kepala desa. Dalam hal ini kebenaran dibangun di atas dasar consensus yakni sesuatu yang salah bila disepakati sebagai kebenaran maka akan menjadi benar.

Hal ini dapat menjadi gambaran bagaimana situasi kondisi politik saat ini, dari sistem pemilihan langsung dengan situasi kondisi dan proses yang gaduh akan sulit lahir pemimpin yang berkualitas, akan tetapi yang lahir adalah pemimpin yang terpilih dari hasil jumlah terbanyak. Ada hal lainnya dari politik uang pada pemilihan kepala desa adalah tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tingginya politik uang maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat, namun rasanya partisipasi politik yang disebabkan oleh politik uang adalah partisipasi politik yang semu, sebab bukanlah partisipasi politik yang didasari atas keyakinan. Mereka yang larut dalam partisipasi politik yang disebabkan politik uang merupakan partisipasi yang tidak memiliki nilai, prinsip, bahkan idealisme yang justru pada kedepannya akan sangat lemah pengawasan politik, baik secara kelembagaan maupun yang dilakukan oleh masyarakat karena semua itu telah tergadaikan dalam transaksi politik. Akibat dari lemahnya pengawasan politik pada proses pemilihan maka terjadi politik transaksi walau dimaksudkan hanya untuk mendorong partisipasi politik. Akan tetapi transaksi politik tersebut justru memotong keseimbangan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tidak adanya ikatan emosional antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Bagi sebagian masyarakat Desa Pengasih memiliki kemauan politik untuk mengubah kebiasaan yang terjadi. Kemauan perubahan politik

ditandai dengan memilih golput dikarenakan menolak kebiasaan keliru yang masih berlaku hingga dianggap lumrah. Sebaliknya para kotestan calon kepala desa tidak memiliki keinginan yang kuat untuk merubah kebiasaan keliru tersebut. Sikap tersebut memperkuat pilihan golput pada pemilihan kepada Desa Pengasih. Sikap golput sebagai pernyataan sikap politik masyarakat pada ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan pendapat Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu kemauan politik. Artinya kemauan pemegang kekuasaan untuk memperbaiki sistem politik. Pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah rakyat dikarenakan kedaulatan politik berada di tangan rakyat yang diserahkan kepada pemimpin pada saat mencoblos dalam pemilihan. Sikap masyarakat memilih ataupun tidak memilih merupakan partisipasi politik. Dari sikap politik tersebut, perlu mendapat perhatian adalah sikap tidak memilih atau golput yang disebabkan adanya pilihan kemauan politik untuk keluar dari sistem pemilihan langsung yang tidak kompatibel, kompetisi yang tidak sehat, dan melakukan segala cara, sehingga tercipta kondisi kegaduhan politik. Disisi lain tugas berat bagi pemimpin terpilih karena adanya legitimasi yang tidak utuh dari masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu pemimpin terpilih

diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan juga harus dapat memperbaiki sistem politik yang ada khususnya tentang pemilihan kepala desa yang lebih baik di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi politik masyarakat Desa Pengasih tidak lepas dari dua aspek penting yaitu kesadaran politik dan keyakinan politik. Kesadaran politik masyarakat Desa Pengasih dipengaruhi oleh situasi kondisi wilayah yaitu wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Masyarakat di wilayah perdesaan memiliki kesadaran partisipasi politik yang masih rendah karena masih menjunjung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Selain itu masyarakat perdesaan masih cenderung mengikuti sosok pemimpin atau tokoh masyarakat yang dituakan dalam desa sehingga akan lebih cenderung bergantung pada pemimpin atau tokoh yang dituakan yang dianggap mempunyai pengaruh. Sedangkan masyarakat Desa Pengasih yang masuk wilayah perkotaan, memiliki keyakinan politik yang berbeda. Hal itu dapat dilihat dari keputusan politik masyarakat tidak bergantung pada pilihan orang lain, tetapi masyarakatnya memilih atas dasar kehendak dan pandangan sendiri, sehingga cenderung lebih bebas memilih siapa saja menurut pendapat dan pemikiran masing-masing, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Pengasih sebagai berikut:

- a) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pengasih yakni semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi kesadaran partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.
- b) Tingkat Ekonomi Masyarakat Desa Pengasih yakni semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang mapan ekonomi memiliki banyak waktu memikirkan masalah politik, dibandingkan masyarakat yang tidak mapan ekonominya sebab kesehariannya dihabiskan memikirkan masalah pekerjaan dan kelangsungan hidupnya. Jadi tingkat ekonomi turut menjadi salah satu penentu partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Pengasih.
- c) Kemauan Politik Masyarakat Desa Pengasih yakni semakin tinggi kemauan politik maka semakin kuat dorongan perubahan kebiasaan politik yakni meninggalkan cara-cara lama seperti memberikan sesuatu sebagai ransangan partisipasi politik. Kemauan politik masyarakat Desa Pengasih adalah sistem politik yang melahirkan pemimpin desa yang kompatibel, memiliki kapasitas, dan integritas.

Hal tersebut akan tercapai pada sistem politik pemilihan kepala desa yang baik. Apabila kemauan politik rendah, maka sistem politik tidak mengalami perubahan kearah yang lebih baik dan terlihat sistem politik yang ada hanya semu semata.

Dalam meningkatkan kualitas pemilihan kepala desa dapat dilakukan melalui pendekatan sosial maupun kultural yang dimaksudkan untuk mendorong kesadaran politik dan keyakinan politik masyarakat. Dari pendekatan sosial dan kultural memberikan dampak pemahaman akan arti, tujuan dan pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan terhadap organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Desa Pengasih, seperti organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), organisasi pemuda seperti karangtaruna, kelompok tani masyarakat Desa Pengasih, kelompok paguyuban gamelan Desa Pengasih, atau pendekatan ketokohan keagamaan melalui ceramah di masjid maupun tempat ibadah lainnya dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih efektif dalam membangun partisipasi politik masyarakat sekaligus juga sebagai pendidikan politik kepada masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat merupakan pendidikan politik memuat nilai kepentingan

bersama, kepentingan desa, bahkan untuk kepentingan negara, jadi bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Bila memerhatikan struktur kepanitiaan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Pengasih tidak terdapat panitia seksi sosialisasi. Akibatnya, tidak ada yang mengatur informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya sosialisasi pemilihan kepala desa. Untuk meningkatkan antusias masyarakat pada pemilihan kepala desa maka diperlukan unit khusus pada kepanitiaan pemilihan kepala desa yang menangani sosialisasi pemilihan kepala desa. Hal tersebut sangat penting agar sosialisasi fokus dilakukan dan terarah, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, serta teredukasi mengenai pentingnya pemilihan kepala desa.

Selanjutnya diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada masyarakat berkaitan dengan:

- a) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pengasih. Meningkatkan mutu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Menyelenggarakan pendidikan politik di sekolah, dengan cara meningkatkan mutu pelajaran muatan lokal dan pendidikan kewarganegaraan agar para siswa belajar memahami tentang kedaerahan, kebersamaan, pemerintahan, dan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki kewajiban dan hak.

Kemudian perlu adanya program beasiswa bagi siswa yang berprestasi di desa, maupun program beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu berprestasi hingga ke jenjang SMA. Selain itu melalui wadah organisasi sekolah seperti kegiatan OSIS, pramuka, dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dapat melatih dan memberi pemahaman kepada para siswa mengenai pengetahuan Pancasila, kepemimpinan, kedaerahan, dan kesadaran kewarganegaraan. Disamping itu bagi masyarakat Desa Pengasih maupun desa lainnya, penting diselenggarakan pendidikan kesetaraan, seperti pendidikan kesetaraan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Adapun pendidikan kesetaraan ini diberikan kepada mereka yang putus sekolah atau kurang mendapatkan pendidikan formal di masa lalu. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat desa, sebab dengan pendidikan maka masyarakat akan memiliki pengetahuan yang baik akan kepentingan desa hingga negara yang harus dikedepankan. Kesadaran tersebut akan semakin menaikkan moral partisipasi politik dalam kerangka kesadaran bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat sehingga

masyarakat desa dapat lebih berkarya untuk kepentingan bersama. Kondisi tersebut memerlukan adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan sesuai dengan kultur, nilai, dan norma yang berlaku di desa maupun di daerah setempat. Pendidikan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi dan situasi masyarakat setempat akan menentukan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Sedangkan untuk pendidikan politik, pemerintah daerah harus proaktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Artinya, pemda harus aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara intensif mengenai pendidikan pancasila dan kesadaran bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

- b) Tingkat Ekonomi Masyarakat Desa Pengasih. Disadari ataupun tidak, tingkat ekonomi turut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik dan tingkat ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Bila tingkat ekonomi baik maka partisipasi politik tinggi, sebaliknya jika tingkat ekonomi turun maka partisipasi politik rendah. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan partisipasi politik

masyarakat maka perlu memerhatikan tingkat ekonomi masyarakat Desa Pengasih agar dengan tingkat ekonomi yang baik maka partisipasi politik juga akan lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang usaha kepada masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, adanya dukungan distribusi atau pemasaran produksi dari desa, adanya dukungan promosi, maupun dukungan akses transportasi dan komunikasi, kemudian memberikan fasilitas simpan pinjam dan mengaktifkan organisasi koperasi Desa Pengasih agar dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan perekonomian sehingga akan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

- c) Kemauan Politik Masyarakat Desa Pengasih yang sebagian tidak memilih (golput) merupakan sikap politik yang harus disikapi dengan arif. Sikap golput terdapat dua kemungkinan, *pertama*, karena didasarkan atas ketidakpercayaan pada mekanisme pemilihan. Para pemilih merasa curiga terhadap para penyelenggara. Kecurigaan ini tidak dinyatakan secara langsung, akan tetapi direspon dengan tidak memilih. Untuk mengatasi hal ini merupakan tugas panitia pemilihan agar seyogianya berlaku netral sehingga kepercayaan publik dalam mekanisme pemilihan dapat terjaga, baik pada proses pemilihan

maupun setelah pemilihan. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan panitia penyelenggara karena berkaitan dengan legitimasi pemimpin. *Kedua*, golput didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap para calon. Adanya anggapan bahwa semua calon tersebut tidak layak untuk menjadi pemimpin sehingga mereka memutuskan untuk tidak memilih. Upaya mengatasi hal ini, agar panitia pemilihan memiliki unit khusus penjangkaran calon pemimpin, membuka kesempatan sebesar-besarnya dengan melakukan sosialisasi, melakukan seleksi yang baik dan transparan. *Ketiga*, golput karena mekanisme pemilihan langsung dianggap tidak cocok pada masyarakat desa yang tatanan sosialnya kondusif, dengan nilai kekeluargaan masih kuat, dan masih teguh memegang nilai dan norma. Dalam hal ini pemilihan langsung dilihat sebagai instrument memecah belah kekeluargaan dan kondisi yang kondusif secara sosial dan budaya. Mereka menolak untuk menjadi bagian dari sistem yang dianggap merusak nilai kekeluargaan, sosial, dan budaya sehingga mereka memilih golput. Untuk mengatasi hal ini maka perlu sebuah kajian sejarah mengenai pengangkatan para pemimpin di desa, khususnya di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa memiliki hak

untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai budaya yang berlaku, sehingga pengangkatan pemimpin desa berdasarkan atas nilai budaya lokal sebagai solusi dalam menjaga tatanan sosial dan budaya. *Keempat*, adanya anggapan bahwa pemilihan langsung melanggar Pancasila karena demokrasi dalam Pancasila adalah pemilihan tidak langsung atau pemilihan perwakilan. Bagi mereka yang meyakini hal ini tentunya menolak untuk memilih karena menganggap pemilihan langsung telah melanggar Pancasila yang berarti melanggar falsafah negara. Untuk mengatasi hal ini maka perlu adanya sebuah pemikiran baru mengenai pemilihan kepala desa dengan mekanisme pemilihan oleh lembaga perwakilan masyarakat desa atau dilakukan secara musyawarah mufakat karena pada proses musyawarah mufakat lebih mengedepankan kualitas gagasan, sehingga gagasan yang terbaik menjadi pilihan bersama (*win-win solution*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mas'ood, Mochtar dan Mc Andrews Colin. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. kecamatan-pengasih-tahun-2015.html, yang diakses 7 September 2016 pukul 16.30 WIB
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. <http://politik.kompasiana.com/2013/09/19/mengapa-masyarakat-memilih-golput-593242.html>, yang diakses 8 September 2016 pukul 14.00 WIB
- Sumber lain :**  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diakses tanggal 29 September 2016 pukul 20.00 WIB
- <http://kulonprogonews.com/news/pilka-des-di-kulonporogo-diwarnai-dugaan-praktik-politik-uang-berita-kulonprogo-news>, yang diakses pada 26 September 2015 pukul 16.00 WIB
- <http://kulonprogonews.com/news/dugaan-politik-uang-pilkades-di-kulonprogo-bakal-sulit-dibuktikan-berita-kulonprogo-news/> yang diakses pada 10 September 2016 pukul 16.00 WIB
- <http://sorotkulonprogo.com/berita-kulonprogo-1122-warga-kecewa-kampanye-kades-tak-lakukan-pertemuan-langsung.html>, yang diakses pada 10 September 2016 pukul 19.30 WIB
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.
- <http://pengasih.kulonprogokab.go.id/article-121-tiga-desa-di-kecamatan-pengasih-menggelar-pilkades-tahun-2015.html>, yang diakses 7 September 2016 pukul 16.00 WIB
- <http://pengasih.kulonprogokab.go.id/article-121-perolehan-suara-sementara-pilkades-wilayah->